

Peran Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Dalam Mengelola Website Sebagai Sarana Public Relations Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone

The Role of Informatics Communications and Cryprying Services In Managing The Website As A Means Of Public Relations In The Regional Government Of Bone District

Mul Khaeri Ikram^{*}, Marini

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa

*email: ikrammulkhaeri@yahoo.com

Diterima: 10 Maret 2022 / Disetujui : 30 Juli 2022

Abstrak

Pemerintah berbasis E-Government lekat dengan Hubungan masyarakat (Humas) yang berfungsi sebagai manajemen membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat untuk kedua belah pihak, hubungan atau interaksi ini mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. Olehnya itu, Pemerintah Daerah dituntut untuk menjalin hubungan dengan masyarakatnya melalui pemanfaatan website sebagai jalur komunikasi lain antara pemerintah dan masyarakat dengan menjalankan prinsip-prinsip humas. Kabupaten Bone merupakan salah satu daerah yang mengacu pada aturan perundang undangan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan E-Government. Teknik triangulasi data kemudian digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan menggabungkan 3 teknik pengumpulan data (observasi, wawancara dan dokumentasi) terhadap strategi dan efektivitas Diskominfo dalam mengelola website. Strategi yang dijalankan berdasarkan penetapan tujuan dan program serta sosialisasi mengenai manfaat website ke setiap SKPD dan masyarakat yang dilakukan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone masih rendah. Masih banyaknya kecamatan dan desa yang belum terjangkau jaringan internet terutama wilayah pedalaman menjadikan efektivitas dari pengelolaan website belum terealisasi dengan baik. Oleh karena itu, sosialisasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat dan peningkatan SDM perlu dilakukan sehingga kebutuhan informasi masyarakat bias terpenuhi dan melalui website ini akan terjalin seutuhnya hubungan antara masyarakat dan pemerintah

Kata Kunci: E-Government, Hubungan Masyarakat, Strategi, Efektivitas

Abstract

E-Government-based government is attached to public relations (PUBLIC RELATIONS), which serves as manager to build and maintain good relationships and benefit both parties. These relationships or interactions affect the success or failure of the organization. Therefore, the Local Government is required to establish relations with its people through the use of the website as another line of communication between the government and the community by carrying out the principles of public relations. Bone Regency is one of the regions that refers to the laws and regulations of local governments in order to realize E-Government. Searches of websites belonging to the Bone Regency Local Government can be accessed through www.bone.go.id. Data triangulation techniques were then used in this study, which combines 3 data collection techniques (observation, interview, and documentation) against the strategy and effectiveness of Diskominfo in managing websites. The strategy carried out based on the determination of goals and programs and socialization about the benefits of the website to each SKPD and the community carried out by the Information Communication Office, and Persandian Bone Regency is still low. There are still many sub-districts and villages that have not been reached by internet networks, especially inland areas, making the effectiveness of website management not realized properly. Therefore, socialization and dissemination of information to the community and the improvement of human

resources need to be done so that the information needs of the community can be met, and through this website will be fully established the relationship between the community and the government.

Keywords: *E-Government, Public Relations, Strategy, Effectiveness*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi melalui internet pada era globalisasi mengalami peningkatan yang sangat pesat. Hal ini tentunya membawa dampak diberbagai sektor kehidupan, salah satunya yaitu sektor pemerintahan. revolusi baru dalam pemerintahan membawa peralihan dari sistem kerja yang konvensional ke era digital seperti penggunaan teknologi komputer dan internet. Menurut Hage dan Powers *dalam* Anwar (2013) menyebutkan salah satu ciri yang menonjol di era kemajuan teknologi komunikasi dan informasi ini adalah digunakannya teknologi komputer.

Banyak media yang bisa dijadikan alat oleh pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Salah satu cara untuk memberikan layanan E-Government kepada masyarakat yaitu berupa website pemerintah daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan layanan Elektronik (E-Service) untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi, layanan, dan lain-lain.

Pemerintah daerah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan publik yang efektif, hal ini seiring dengan makin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemberitaan media lokal terkait kegiatan pemerintahan, penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perlunya partisipasi di daerah. Sebab, pemerintah sebagai lembaga dalam menjalankan fungsinya di roda pemerintahan memiliki aturan-aturan yang harus dijalankan (Utama, 2014). Hal ini diperkuat dengan diterbitkannya Inpres No. 3 Tahun 2003 yang mewajibkan instansi pemerintah ditingkat pusat dan daerah memiliki website sebagai sistem yang menaungi E-Government itu sendiri.

Berbicara mengenai pemerintah berbasis E-Government, maka lekat dengan hubungan masyarakat (humas) yang berfungsi sebagai manajemen membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat untuk kedua belah pihak, hubungan atau interaksi ini mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. Olehnya itu, pemerintah daerah dituntut untuk menjalin hubungan dengan masyarakatnya melalui pemanfaatan website sebagai jalur komunikasi lain antara pemerintah dan masyarakat dengan menjalankan prinsip-prinsip humas.

Kabupaten Bone merupakan salah satu daerah yang mengacu pada aturan perundang undangan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan E-Government. Penelusuran website milik Pemerintah daerah Kabupaten Bone dapat diakses melalui www.bone.go.id. Diluncurkannya website resmi tersebut bertujuan untuk semakin membuka keran informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sekaligus menjembatani komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Bone dengan masyarakat luas. Apabila penerapan E-Government tersebut berjalan dengan lancar dan baik, maka sangat menunjang terwujudnya prinsip-prinsip humas.

Secara operasional, manfaat website resmi Pemerintah Kabupaten Bone telah memberikan peningkatan yang signifikan dengan diberikannya penghargaan nominasi kategori website terbaik pada Sul-Sel EXPO 2019, namun belum menyandang juara sebagai peraih website terbaik. Hal tersebut tentu membanggakan, tapi esensi penting yang seharusnya didapatkan adalah tingkat kepuasan masyarakat dalam mengakses informasi. Hal ini juga dibuktikan dengan pengunjung website resmi Pemerintah Kabupaten Bone (terlihat jumlah pembaca dalam informasi yang diakses) rata-rata hanya berjumlah 200-300

pembaca per bulannya pada beberapa informasi tertentu yang disajikan. Faktor operasional lain yang perlu dilihat adalah website resmi Pemerintah Kabupaten Bone belum menghadirkan konten yang menarik bersifat inovatif sebagai umpan diakses oleh publik, baik itu penataan informasi yang ada didalamnya maupun dari segi penataan fisik dari portal tersebut. Padahal jika ditelaah lebih lanjut, website Pemerintah Daerah Kabupaten Bone telah menyajikan berbagai informasi mengenai perencanaan pembangunan dan berbagai sosialisasi program pembangunan yang mengharapkan umpan balik dari masyarakat itu sendiri untuk diketahui dan dijadikan bahan untuk membentuk opini publik terhadap tercapainya transparansi informasi pemerintah kepada masyarakat.

Pentingnya menciptakan hubungan masyarakat yang lebih mendukung juga dibahas dalam penelitian terdahulu oleh Liliek Budiastuti Wiratmo, dkk (2017) “Website Pemerintah Daerah Sebagai Sarana Online Public Relations” menyimpulkan bahwa syarat terpenting yang harus dimiliki setiap pemerintah daerah sehingga dapat memanfaatkan website yang mereka miliki adalah kesadaran arti pentingnya layanan public akan informasi yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk itu diperlukan komitmen pimpinan daerah yang menjadi acuan seluruh SDM yang ada dalam tanggungjawabnya sebagai pelayan publik sehingga komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam memberikan informasi dapat berjalan sesuai dengan yang dikehendaki.

Berdasarkan penjelasan dan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana strategi pengelolaan website milik Pemerintah Daerah pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabuapten Bone dalam penyelenggaraan pembangunan daerah pasca penganugerahan nominasi kategori website terbaik pada Sul-Sel Expo 2019 yang belum menyandang gelar juara, khususnya penyediaan layanan informasi publik guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang sesungguhnya yakni menjalankan prinsip-prinsip E-Government dalam peranannya menjalin hubungan antara masyarakat dan pemerintah.

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalahmasalah publik. Dalam konsep governance, pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. Governance menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri (Hetifa, 2003)

Teori menurut Kerlinger (1986; dikutip di Kriyantono, 2014) adalah “seperangkat interelasi dalam konstruk, definisi, dan proposisi yang menjelaskan suatu fenomena secara sistematis dengan cara menjelaskan relasi antarvariabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi fenomena tersebut.” Selain itu, Neuman (2006; dikutip di Kriyantono, 2014) mengatakan bahwa teori merupakan pengetahuan dunia nyata yang terorganisasi, sehingga dapat membantu orang untuk memvisualkan dan menjelaskan sesuatu. “Suatu teori adalah cara melihat dan berpikir tentang dunia” (Deetz dalam Littlejohn & Foss, 2008; dikutip di Kriyantono, 2014). Flinders dan Mills (1993; dikutip di Kriyantono, 2014) mengatakan bahwa teori adalah seperangkat ide yang umum yang mengarahkan suatu tindakan.

Dari beberapa definisi diatas, didapatkan bahwa teori berpijak dari fenomena empiris dan berusaha menjelaskan cara kerja fenomena tersebut serta meramalkan akibat yang ditimbulkannya (Kriyantono, 2014). Dengan kata lain, teori dengan realitas memiliki hubungan yang sangat erat. Untuk mengetahui sebab-akibat dari adanya realitas atau suatu

fenomena, kita membutuhkan teori untuk dapat menjelaskannya. Oleh karena itu, teori dapat dikatakan sebagai simplifikasi dari dunia nyata walaupun satu teori hanya menjelaskan sebagian aspek dari dunia nyata atau realitas atau fenomena tertentu tersebut (Kriyantono, 2014). Walaupun dalam kenyataannya, kita akan membutuhkan lebih dari satu teori untuk menjelaskan realitas atau fenomena yang terjadi.

Dalam praktik public relations, teori merupakan sesuatu yang dinilai penting untuk menunjang perkataan praktisi public relations. Teori dapat digunakan oleh seorang praktisi public relations untuk menjadi pedoman pengambilan keputusan yang terkait dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi saat itu. James Grunig (dalam Culbertson, Jeffers, Stone, & Terrell, 1993; dikutip di Kriyantono 2014) mengatakan bahwa teori dapat digunakan oleh para praktisi untuk merencanakan program dan menggunakan kesuksesan atau kegagalan program untuk merevisi teori. Sehingga, teori dapat dianggap sebagai sesuatu yang dinamis. Selain itu, teori dalam praktik public relations memiliki beberapa fungsi. Dari tulisan Carl H. Botan & Vincent Hazleton, Jr. (1989; dikutip di Kriyantono, 2014) menyatakan bahwa setidaknya terdapat empat fungsi teori bagi para praktisi public relations, yaitu, fungsi deskripsi, fungsi pemahaman, fungsi prediksi dan kontrol, serta fungsi heuristic.

B. METODE PENELITIAN

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor (1975) (dalam Habsy, 2017) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut Ruslan (2010) bahwa tujuan penelitian kualitatif untuk mendapat pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan.

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Bone merupakan lokasi penelitian ini dilakukan dan berlangsung sejak tanggal 15 Desember 2019 hingga 30 Januari 2020.

Dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder digunakan untuk mendapatkan basis data sesuai dengan permasalahan pada penelitian ini. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara terhadap narasumber atau informan dan dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Pengambil kebijakan (Policy maker) dan pihak yang terkait (stakeholder) sebagai informan dipilih berdasarkan Purposive Sampling dan Snowball yang akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan, baik dari pemerintah Kabupaten Bone yang terkait sebagai objek yang menangani langsung website milik pemerintah dan berkontribusi dalam sosialisasi program pembangunan pemerintah melalui website milik pemda, maupun dari masyarakat Kabupaten Bone (tokoh masyarakat dan kaum intelek/generasi millennial) sebagai sasaran dalam menanggapi keberadaan website milik pemda yang akan mensosialisasi program pembangunan yang diharapkan ada umpan balik dari sosialisasi program tersebut. Sedangkan data sekunder yang sifatnya mendukung keperluan data primer diperoleh dari buku-buku dan literatur yang telah tersedia.

Teknik triangulasi data digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan menggabungkan 3 teknik pengumpulan data (observasi, wawancara dan dokumentasi) terhadap strategi dan efektivitas Diskominfo dalam mengelola website.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone terbentuk pada 2013 yang secara resmi mengambil alih peranan dalam mengelola website Pemda yang kala itu belum merujuk pada www.bone.go.id. Dinas Komunikasi Informatika dan

Persandian Kabupaten Bone dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai yang diatur dalam Surat Keputusan Bupati No. 76 tahun 2016 berkewajiban dan merupakan kebutuhan bagi Diskominfo untuk menyusun perencanaan kinerjanya setiap tahun dalam bentuk dokumen Rencana Kerja (Renja) atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dimana Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bone merupakan unsur pelaksana Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta bertanggung jawab dalam mengelola data, pengembangan komunikasi, informasi, statistik dan persandian yang kemudian direalisasikan dalam pembagian tupoksi sub bagian pada struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bone.

Penelitian dilakukan pada tiga ranah, yaitu pembuat kebijakan atau pengelola website (back office), tampilan website (front office), dan pengguna (users).

Informan kunci sebagai penentu dalam menjawab indikator penelitian adalah Mursalim S.Sos, M.Si yang merupakan Kepala Bidang Teknologi Informasi dimana bidang ini memiliki andil untuk mengelola website secara khusus. Dalam wawancara yang dilakukan, beliau mengatakan bahwa “dalam peranan Diskominfo untuk mengelola website adalah kami memfasilitasi berbagai instansi untuk berkoordinasi, karena dalam www.bone.go.id hanyalah sebagian kecil portal yang disediakan untuk informasi-informasi terbaru terkait Kabupaten Bone, karena sudah tersedia berbagai informasi di setiap dinas dan instansi yang dihubungkan melalui www.bone.go.id, walaupun belum semuanya tersedia karena kami masih terbilang baru berdiri.”(24/01/2020)

Beliau menambahkan bahwa kurangnya sosialisasi dan pengenalan website kepada masyarakat memang benar adanya, namun masalah ini diatasi dengan strategi Diskominfo dalam pengelolaan website Pemda ini dengan melakukan bimtek (bimbingan teknis) dan bimkhus (bimbingan khusus) yang telah dilakukan di beberapa instansi itu dibantu dan bekerja sama dengan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), dimulai dengan memanggil SKPD untuk dilatih dalam mengelola website dinas masing masing serta bimkhus dilaksanakan dengan memanggil perwakilan setiap kecamatan untuk dilatih dalam pemanfaatan teknologi dan informasi. Namun beliau mengakui bahwa Teknologi dan Informasi merupakan sebuah hal yang dapat berubah ubah setiap waktu, olehnya itu jika sosialisasi dilakukan ke setiap desa di Kabupaten Bone dengan jumlah kecamatan kurang lebih 27, akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu Mursalim menekankan bahwa dalam hal sosialisasi belum merambah ke setiap desa karena pertimbangan seperti anggaran /dana yang dikelola Diskominfo Kabupaten Bone hanya 0, 3 % (Data Renja Diskominfo tahun 2019).

Saat ini ada banyak akses data dan informasi serta untuk pengaduan kritik dan saran yang disediakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Kabupaten Bone, mulai dari Halo Bone yang terbagi atas 3 yaitu instagram, fb, dan twitter (dikelola oleh diskominfo), ppid.go.id, Laporan, dll dengan berbagai tugas dan fungsi yang hampir sama. Akun instagram Halo Bone yang dihubungkan dengan www.bone.go.id, yang tetap saja tidak banyak orang mengetahui bahwa akun tersebut dikelola oleh diskominfo. Namun, perbedaannya, gambar yang disajikan pada akun instagram lebih menarik dibandingkan dengan yang disajikan pada website. Selain itu, bentuk pengenalan lain dari website www.bone.go.id adalah dengan menempelkan spanduk besar pada Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone.

Namun terlepas dari sosialisasi yang kurang menyentuh setiap lapisan masyarakat, dalam catatan Indikator utama pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone mengupayakan bahwa pada tahun 2017 10 kecamatan dengan jumlah proporsi rumah tangga yang dapat mengakses internet sudah mencapai 229.438 dan pada tahun 2018 akan ditingkatkan menjadi 15

kecamatan, ditahun 2019 menjadi 20 kecamatan serta ditahun 2020 menjadi 27 kecamatan, dengan harapan realisasi 3 tahun mendatang dapat terlihat jumlah rumah tangga yang dapat mengakses internet dan berapa rumah tangga yang belum bisa mengakses internet.

Dari hasil penelitian tampilan website pemerintah daerah Kabupaten Bone disimpulkan bahwa terdapat kurang lebih 17 subdomain website dibawah domain induk www.bone.go.id yang dikelola instansi/dinas masing masing, dengan domain induk dikelola oleh dinas komunikasi informatika dan persandian Kabupaten Bone pada bidang teknologi informasi. Dengan banyaknya subdomain tersebut, namun tanpa sosialisasi dan pengenalan serius kepada masyarakat, ada 2 hal yang akan ditimbulkan, masyarakat yang membutuhkan informasi dan data (memiliki kepentingan) akan kebingungan dengan banyaknya subdomain website yang disajikan, upaya pengaduan online akan diarahkan kemana, dan kemana mereka akan mencari informasi dan data tersebut.

Untuk menguatkan argument stakeholder (pemangku kepentingan) dibutuhkan pandangan lain yang mengabsahkan argument 1 informan. Maka dari itu, Stakeholder yang dimaksud adalah Kepala Desa, Mahasiswa, serta perwakilan dari Organisasi Perempuan. Dalam hal ini Informan terkait hal diatas mengambil 5 sampel mahasiswa, 1 perwakilan organisasi perempuan, dan 2 perwakilan kepala desa yang bermukim 30 km dari wilayah perkotaan.

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap Yasri selaku Kepala Desa Pattimpe mengatakan “saya mengetahui keberadaan website Pemda, namun sejauh ini kami belum pernah dihimbau pihak kabupaten melakukan sosialisasi terkait hal itu. Untuk masyarakat sendiri, saat ini sulit dipungkiri bahwa ada tipe yang masa bodo dan ada pula yang mencari informasi karena kepentingan. Tentunya semua hal itu menjadi factor penentu eksistensi website” (5/01/2020). Dan pada akhir wawancara Yasri menyimpulkan bahwa “kurangnya informasi kepada Masyarakat, Sosialisasi dan pengenalan Website Pemerintah bahwa semua kegiatan Pemda dapat diakses melalui website, tetapi semua itu pun harus dibarengi dengan keinginan untuk mengakses (merasa berkepentingan). Sejauh ini dalam upaya Transparansi Pemerintah Desa yaitu dengan pemasangan spanduk yang memperlihatkan Dana Desa dan realisasi Anggarannya serta papan Informasi kegiatan” (5/01/2020).

Hasil wawancara pada perwakilan organisasi perempuan dan satu mahasiswa juga menuturkan hal yang sama seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Pattimpe. Namun berbeda dengan penuturan tiga informan yang sudah mengetahui adanya website, perwakilan Kepala Desa Bolli AM mengatakan “kami di Desa tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait pengenalan Website Pemda, Padahal jika kami mengetahui Website tersebut ada, akan sangat memudahkan dalam hal penyusunan Renja di Musrenbang Kabupaten karena ada pedoman yang bisa menjadi acuan” dan empat mahasiswa yang menjadi sampel penelitian ini juga menyampaikan hal yang sama bahwa mereka benar-benar tidak mengetahui keberadaan website Pemda.

Hal ini menunjukkan bahwa website yang dihadirkan belum dapat menjadi jawaban atas kebutuhan informasi masyarakat dan belum terjalin seutuhnya hubungan antara masyarakat dan pemerintah melalui website ini.

1. Strategi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dalam Mengelola Website

a) Tujuan dan Program

Setiap organisasi perlu melakukan suatu perencanaan dalam setiap kegiatan organisasinya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penetapan tujuan dan program sangat penting dilakukan sebagai tahap perencanaan dalam menentukan langkah apa yang akan ditempuh untuk pemenuhan peran dalam suatu instansi/lembaga. Tujuan dan program yang

disusun oleh dinas komunikasi informatika dan persandian Kabupaten Bone merupakan hasil dari telaah renstra dan diturunkan dari visi misi pemerintah Kabupaten Bone.

Tujuan dan Program kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dituangkan pada naskah Rencana Kerja tahun 2019 yang mengandung 5 bab terkait dengan tujuan dan program, evaluasi serta pendanaan. Hal tersebut didasarkan pada Kebijakan Nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone yaitu kebijakan atas Penyelenggaraan daerah kemudian juga pada peraturan Presiden nomor 55 tahun 2012 tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014. Selain itu, juga terdapat program nasional yaitu monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi secara nasional.

Namun, hingga saat ini program dan kegiatan yang terkait dengan kebijakan Nasional tersebut belum terlaksana secara optimal. Kedua kebijakan dan program nasional diakui masih menjadi pekerjaan rumah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian yang perlu dijadikan sebagai salah satu prioritas dalam rencana kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone.

Dalam pelaksanaannya, diperlukan komitmen, konsisten, dan konsistensi seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Bone disertai dukungan sarana dan prasarana yang memadai, khususnya dalam penerapan pengendalian internal dalam penyelenggaraan setiap urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone.

b) Sosialisasi dan Pengenalan Website kepada masyarakat

Website Pemerintah Daerah Kabupaten Bone telah banyak berkontribusi aktif dalam penyebarluasan informasi untuk mencapai transparansi di tingkat daerah. Namun, saat ini dengan banyaknya gelar dan prestasi yang diraih sejak 2016 khususnya pada Website Pemda, tetap saja tak dapat dipungkiri bahwa masih banyak yang belum mengetahui adanya website ini. Hal tersebut terbukti dalam penelitian ini, bahwa dari Kepala Desa, Perwakilan Organisasi Perempuan dan Mahasiswa yang notabennya membutuhkan akses data yang lebih lengkap serta informasi yang akurat masih mempertanyakan keberadaan website ini. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dalam mengenalkan website yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Informan dalam penelitian ini memiliki harapan yang sama dalam membentuk eksistensi website Pemda hingga dikenal lebih luas lagi oleh masyarakat hingga ke 27 Kecamatan sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan pengenalan secara serius. Untuk mewujudkan hal tersebut tentu saja dibutuhkan partisipasi pemerintah, kalangan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang tidak dapat dilepaskan dari perannya untuk setiap harinya dapat bersosialisasi dan berbaur kepada masyarakat.

Selain itu, terdapat faktor-faktor yang dapat menunjang proses sosialisasi yaitu faktor lingkungan berupa interaksi sosial yang kemudian akan membangun hubungan antara pemberi informasi dan penerima informasi dan agen sosialisasi yang memegang peran utama dalam keberhasilan proses sosialisasi untuk menyebarkan atau menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang terletak dalam materi sosialisasi. Ketika faktor-faktor tersebut terpenuhi maka hal inilah yang disebut sebagai public relations.

Jadi, sosialisasi kepada masyarakat menjadi sangat penting karena melalui sosialisasi, masyarakat dapat berpartisipasi untuk kepentingan hidupnya dan menciptakan generasi untuk kelestarian kehidupan selanjutnya.

2. Efektivitas Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dalam Mengelola Website

Website Pemda sebagai sarana *Public Relations* saat ini belum terbangun sepenuhnya. Dalam proses perjalanan pengembangan Website Pemerintah Daerah

www.bone.go.id banyak menemui hambatan dan tantangan. Hambatan internal dan eksternal tidak dapat dihindari, dimana Internal mencakup SDM yang ada didalamnya, dana yang digelontorkan serta faktor kesiapan dari segi sarana serta prasarana kantor dalam menunjang pengelolaan tersebut. Hambatan eksternalnya tentu saja adalah Masyarakat itu sendiri, dimana Masyarakat terbagi atas dua tipe yaitu Masyarakat yang tidak ingin tahu apapun dan Masyarakat yang ingin tahu serta merasa memiliki kepentingan.

Disamping itu, dalam pembentukan struktur Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone yang sejak 2016 harus mampu berdiri dan bersaing serta menyamaratakan kedudukan dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten lain yang sudah lebih dahulu mencetak eksistensinya pun menjadi tantangan yang lain.

Dalam Evaluasinya, capaian program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja terdapat 3 poin umum yakni terbatasnya kompetensi dan kapasitas Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dari segi kualitas dan kuantitas dengan mengingat beban kerja berdasarkan luas wilayah, khususnya dalam hal penyebaran informasi, terbatasnya sarana dan prasarana aparatur Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian serta terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diskominfo yang dinilainya sekitar 0,3 % dari total anggaran belanja (APBD). Selain itu, dari segi pencapaian realisasi anggaran sepenuhnya tercapai hampir 100 % namun anggaran banyak digunakan pada sarana dan prasarana kantor.

Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi faktor kedua penentu keberhasilan kerja suatu organisasi/lembaga. Sedangkan fakta di lapangan bahwa banyak penempatan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya, bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa kuantitas SDM ASN (Aparatur Sipil Negara) sebanding dengan jumlah honorer diskominfo.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kabid Teknologi Informasi, Bidang Statistik, dan Bidang Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian menjelaskan bahwa teknologi adalah hal yang sangat gampang berubah tren, tidak dapat dibaca dengan pasti seperti apa teknologi kedepannya, tetapi yang pasti, ditengah teknologi yang kian pesat tersebut, SDM tidak serta merta gampang menyesuaikan dengan keadaan, olehnya itu sangat dibutuhkan SDM yang memiliki kualitas, berinovasi tinggi, dan mampu menyesuaikan dengan cepat.

Olehnya itu, sebagai solusi dalam meningkatkan kapasitas kemampuan SDM khususnya dalam internal diskominfo, adalah dengan melakukan bimbingan teknis dan bimbingan khusus. Hal ini dilakukan agar SKPD dalam mengelola website instansi masing-masing sudah mampu mengoperasikan, mengelola dan memantau penyajian informasi didalamnya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam hal strategi penetapan tujuan dan program terdapat kekeliruan dalam menetapkan skala prioritas yang tentunya harus sesuai dengan skala kebutuhan dan tingkat urgensi pemenuhan kebutuhan tersebut. Pada indikator sosialisasi/pengenalan website kepada masyarakat tidak dilaksanakan dengan serius dan target yang dianggap tidak tepat sasaran tetap berimbas pada masih banyak masyarakat yang luput akan informasi website pemerintah daerah.

Dalam menilai efektivitasnya bahwa dari segi pemenuhan indikator target berdasarkan kualitas, kuantitas, dan waktu serta biaya bahwa dari total anggaran pada 2018 sesuai rencana terealisasi hampir 100 % pada setiap pemenuhan program. Namun dari segi

kualitas, banyak yang terlihat bahwa pencapaian program ini hanyalah sebagai formalitas belaka tanpa ada dampak secara langsung dan tindak lanjut dari program tersebut. Hambatan yang paling lumrah terjadi dengan banyaknya ketimpangan yang terjadi adalah keterbatasan kompetensi dan kemampuan SKPD dalam hal pengelolaan dan pengembangan website, hal ini juga mendukung spekulasi dan pendapat masyarakat dalam mengukur kesiapan diskominfo dalam mengelola website ini perlu upaya yang lebih keras untuk tetap berjalan sesuai rencana kerja, serta merancang apa yang benar-benar menjadi kebutuhan informasi dan data masyarakat. Dalam beberapa pendapat stakeholder bahwa upaya menjalin hubungan dengan masyarakat luas melalui Website Pemerintah Daerah ini masih belum optimal serta belum terjalin sepenuhnya komunikasi dua arah antara pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Khoirul, dkk. 2013. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan di Era Otonomi Daerah (SIMDA). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Habsy, All, Bakhrudin. 2017. “Seni Memahami Penelitian Kualitatif Dalam Bimbingan dan Konseling: Studi Literatur”. *Jurnal Konseling Andi Matappa*. 1(2):90-100.
- Kabupaten Bone. 2020. <https://bone.go.id/>. [Access online 14 Juni 2020]Kriyantono, R. (2014). *Teori public relations perspektif barat dan lokal: aplikasi penelitian dan praktik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Ruslan, Rosady. 2010. *Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Shabrina, F. (2020). *Pembelajaran Daring Dengan Menggunakan Metode Information Search Mata Pelajaran Al-Islam Di SMP Muhammadiyah 2 Surakarta Pada Kondisi Covid-19*. Tidak dipublikasikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sumarto Hetifa Sj. 2003 *Inovasi Partisipasi dan Good Governance*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia.
- Utama, Johan, Y. 2014. *Pengertian Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Gramedia
- Wiratmo, Budiastuti, Liliek., dkk. 2017. “Website Pemerintah Daerah Sebagai Sarana Online Public Relations”. *Jurnal ASPIKOM*. 3 (2):326-339.